

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko. 2003 *Membangun Good Governance Di Desa*. IRE Press : Yogyakarta.
- Ali. H.Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin, dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Anugrah, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Fajar, Mukhti dan Yulianto Achmah. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pusaka Pelajar.
- Gaffar, Janedri M. 2013. *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hasan, Hambali. 1988. *Perancangan Otonomi Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- HAW, Widjaja. 2010. *Otonomi Desa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Pustaka.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Idrus. Muhammad. 2007 *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T. *Desa Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1988.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2007. *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan : UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi*

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Mahfud MD, Moh. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia.* Jakarta : Rineka Cipta.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarta.

Muhammad.Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ndraha, Talizihudu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa.* Jakarta : PT.Bina Aksara, 1981.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Jakarta : Erlangga.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Solekhan. Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat.* Malang: Setara Press.

Soekanto. Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta, UI Press.

Suharto, Didik G. 2016. *Membangun Kemandirian Desa.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suteki. 2018. *Metedologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik).* (Depok : PT Raja Grafindo Persada.

Wastitiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.* Bandung : Fokus Media.

Zainuddin, Ali.2009. *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta:Sinar Grafika.

2. Sumber Pustaka Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

3. Jurnal

Arif Sofyan, 2013, "*Pemaknaan Demokrasi di Era Reformasi (Opini Masyarakat Jawa Tengah terhadap Demokrasi Saat Ini)*" Jurnal Ilmu Politik, Vol.4 No.2, Universitas Diponegoro, hlm.9.

Ani Purwanti, 2015, "*Partisipasi Perempuan pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur*", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No.2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hlm.190.

- Indah Susulowati, 2002, *“Analisis Tingkat Keberhasilan Manajemen Pemerintahan Desa Dilihat Dari Perspektif Gender (Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Klaten Jawa Tengah)”* Jurnal Bisnis Strategi. Vol.9/Juli/Th.VII. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Hlm. 64.
- Revina Riana, Retno Saraswati, Fifiana Wisnaeni. 2017. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan Demokrasi Desa di Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar*. Diponegoro Law Journal. Vol. 6 No. 2. Tahun 2017.
- Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas dan Walid Mustafa Sembiring. 2016. *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol.4 No.2. Tahun 2016.
- Sukriono, Didik. 2013. *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi : Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, cet I, Malang : Setara Oeress, Hlm 193.
- Sutrisno Purwohadi Mulyono, 2014, *“Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa”* Jurnal MMH Jilid 43 No.3, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Hlm. 441.
- Akhmad Marisi. 2016. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 4 No. 3. Tahun 2016.
- Muntoha, 2009, *“Demokrasi dan Negara Hukum”*, Jurnal Hukum, Volume 16, nomor 3, Juli 2009, Halaman 388.
- Fatmariza, 2003, *“Kesetaraan Gender Langkah Menuju Demokratisasi Nagari”* Jurnal Demokrasi Vol.II No.1 Th 2003, Hlm.31.

- Loura Hardjaloka, 2012, “*Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi*” Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012. Hlm. 408.
- Emilda Firdaus, 2011, “*Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2011, Hlm.13.
- David M.Trubeck, *Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development*, dalam Yale LawJournal, Vol. 82, 1972, hal. 4-5; lihat, Donald Black, *Sociological Justice*, Oxford University Press, 1989, hal 44.
- Andrea Cornwall and Vera Schattan P. Coelho, 2004, “Spaces for Change? The Politics of Participation in New Democratic Arenas” SOAS, University of London.
- Ombi Romli , Elly Nurlia. 2017. *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 3 No. 1. Tahun 2017.
- Vitriyana Kusuma Dewi dan Gayung Kasuma, Juni 2014, “*Perempuan Masa Orde Baru (Studi Kebijakan PKK dan KB tahun 1968-1983)*”. Jurnal Kesejarahan, Vol.4 No.2, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Hlm 159.

4. Sumber Pustaka Website

<https://risehtunong.blogspot.com/2017/07/6-prinsip-dalam-pengembangan.html>

diakses pada tanggal 1 November 2018 pukul 12.45.

http://www.unwomeneseasia.org/projects/Cedaw/docs/KonvensiCEDAW_textBahasa.pdf. Diakses 20 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB.

5. Wawancara

- a. Wawancara dengan Bapak Sudarman Selaku Kepala Desa, Desa Pelem Kecamatan Blora Kota, tanggal 4 Februari 2019.
- b. Wawancara dengan Ibu Endang Sri Rahayu selaku Ibu PKK, Desa Pelem Kecamatan Blora Kota, tanggal 4 Februari 2019.
- c. Wawancara dengan Bapak Rusbandiono Selaku Anggota BPD Laki-laki, Desa Pelem Kecamatan Blora Kota, tanggal 4 Februari 2019.
- d. Wawancara dengan Ibu Sri Amah Selaku Anggota BPD Perempuan, Desa Pelem Kecamatan Blora Kota, tanggal 4 Februari 2019.
- e. Wawancara dengan Bapak Suyatno Selaku Kepala Desa, Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora tanggal 9 Februari 2019.
- f. Wawancara dengan Bapak Kusnandar Selaku Anggota BPD Laki-laki, Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora tanggal 9 Februari 2019.
- g. Wawancara dengan Bapak Lamijo Selaku Ketua BPD, Desa Pelem Kecamatan Blora Kota, Kabupaten Blora tanggal 4 Februari 2019.
- h. Wawancara dengan Ibu Suhartini Selaku masyarakat Desa Pilang Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, tanggal 9 Februari 2019.
- i. Wawancara dengan Bapak Sumindar Selaku Kepala BPD, Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, tanggal 9 Februari 2019.
- j. Wawancara dengan Ibu Yuli Nasriati Selaku Ibu PKK Desa Pilang Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, tanggal 9 Februari 2019.